

## INTISARI

Skripsi ini berusaha menilik relasi dan peran aktor dalam membentuk infrastruktur migrasi dalam konteks pekerja migran Indonesia di Malaysia (Malaysianan), baik yang masuk melalui jalur formal maupun diselundupkan dan tak berdokumen. Dengan berfokus pada cerita-cerita pada skala mikro dalam kehidupan Malaysianan sehari-hari, saya berusaha mendiskusikan dan menganalisis bagaimana Malaysianan mengakses pekerjaan dan berbagai layanan; serta meletakkan diskusi mengenai hal ini dalam konsep infrastruktur migrasi. Melalui skripsi ini saya berargumen bahwa terdapat infrastruktur migrasi alternatif yang dibentuk untuk “orang kosong” oleh jaringan Malaysianan (pekerja migran Indonesia di Malaysia), warga lokal Malaysia, dan otoritas negara. Infrastruktur migrasi alternatif ini kerap hadir dalam posisi ilegal menurut sudut pandang negara karena mencakup peran aktor dan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Namun, infrastruktur ini didukung sebagai aktivitas yang wajar dan boleh dilakukan secara sosial pada tingkat lokal. Fenomena kehadiran infrastruktur migrasi alternatif dapat dilihat sebagai cara Malaysianan dalam menentukan jalur mobilitasnya serta lepas dari sistem migrasi yang kerap tak menguntungkan mereka.

### **Kata Kunci:**

Pekerja Migran Indonesia, Infrastruktur Migrasi, Malaysianan, Orang Kosong, Akses dan Layanan, *Illegal but licit*

## ABSTRACT

This thesis aims to examine the relationship and role of actors in shaping migration infrastructure in the context of Indonesian migrant workers in Malaysia (Malaysianan), both those who enter through formal channels and those who are smuggled and undocumented. By focusing on micro-level stories in the daily lives of Malaysianan, I seek to discuss and analyze how Malaysianan access employment and various services, and place this discussion within the concept of migration infrastructure. Through this thesis, I argue that there is an alternative migration infrastructure formed by Malaysian networks, local Malaysian residents, and state authorities. This alternative migration infrastructure often exists in an illegal position from the perspective of the state because it is composed of actor roles and activities that do not comply with applicable regulations. However, this infrastructure is supported as a socially acceptable activity at the local level. The phenomenon of the presence of alternative migration infrastructure can be seen as Malaysianan's way of determining their mobility path and breaking free from a migration system that often disadvantages them.

**Keyword:**

Indonesian Migrant Worker, Migration Infrastructure, Malaysianan, Access to Services, Illegal but Licit.